



Komersialisasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam

Alifiani Purwaningrum^{1*}, Moh Sugeng Sholehuddin², Muhammad Hufro³

Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email Penulis: alifiani.purwaningrum22051@mhs.uingusdur.ac.id, universitas.m.sugeng.s@uingusdur.ac.id,

Muhammad.hufro@uingusdur.ac.id

Info Artikel

Masuk:

28 Nov 2023

Diterima:

02 Des 2023

Diterbitkan:

08 Des 2023

Kata Kunci:

Komersialisasi,
Pendidikan

Abstrak

Artikel ini membahas tentang komersialisasi pendidikan di Indonesia mengacu pada dua situasi yang berbeda. Pertama, adanya lembaga pendidikan yang menawarkan program dan fasilitas berkualitas tinggi, namun dengan biaya pendidikan yang sangat tinggi sehingga hanya dapat diakses oleh orang-orang kaya yang mempunyai kemampuan ekonomi. Kedua, adanya lembaga pendidikan yang lebih fokus memungut biaya pendidikan tinggi tanpa mengutamakan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini penulis akan mendalami pengertian komersialisasi pendidikan dan permasalahan komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan atau komersialisasi pendidikan seringkali dikaitkan dengan kebijakan atau langkah yang memposisikan pendidikan sebagai sektor jasa yang diperdagangkan. Penulis menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berparadigma kualitatif, sehingga secara historis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu tidak melibatkan analisis data kuantitatif. Dari segi objek penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sejarah yang melibatkan analisis dokumen terstruktur. Penelitian ini berfokus pada kajian pemikiran seorang tokoh, yang didasarkan pada karya tulis yang dihasilkan oleh tokoh tersebut, seperti buku dan sumber informasi lainnya. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka, sehingga teknik dokumentasi menjadi pendekatan yang relevan.

Melalui artikel ini penulis bermaksud menggali lebih dalam, hal ini bertujuan agar kita sebagai pelaku maupun korban dapat memahami permasalahan komersialisasi pendidikan, sehingga buku ini dapat menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Komersialisasi pendidikan secara tidak langsung juga menimbulkan kesenjangan di antara pihak-pihak yang terlibat. bermodal dan pihak yang bermodal kecil. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ivan Illich dalam Benny Susanto (2005: 119), "komersialisasi pendidikan dianggap sebagai misi lembaga pendidikan modern untuk melayani kepentingan pemilik modal dan bukan sebagai sarana pembebasan bagi kaum tertindas". Akibatnya, tidak tercapainya pendidikan yang humanis dalam proses pendidikan karena komersialisasi pendidikan, menurut Satriyo Brojonegoro, hanya bisa dinikmati oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai modal untuk mengakses pendidikan. (Hartini, 2011: 16).

PENDAHULUAN

Mengkomersialisasikan pendidikan berarti menjadikan pendidikan sebagai bisnis atau memasukkan unsur-unsur bisnis ke dalamnya. Hal demikian tentunya sudah sering terjadi diberbagai jenjang Pendidikan. Banyak sekolah-sekolah yang melakukan penarikan iuran di luar ketentuan pemerintah, atau biasa pemerintah menyebutkan biaya pungli dalam sekolahan, lalu pihak pemerintah menyalahkan pihak sekolah, dengan mengaitkan dana bos.

Artikel ini membahas mengenai Komersialisasi pendidikan di Indonesia mengacu pada dua situasi yang berbeda. Pertama, ada lembaga pendidikan yang menawarkan program dan fasilitas berkualitas tinggi, tetapi dengan biaya pendidikan yang sangat tinggi sehinggahanya dapat diakses oleh kalangan kaya yang memiliki kemampuan ekonomi. Kedua, ada lembaga pendidikan yang lebih fokus pada mengenakan biaya pendidikan tinggi tanpa memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan.

Komersialisasi pendidikan yang pertama didasari oleh dorongan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sementara yang kedua lebih cenderung dipicu oleh keserakahan pihak pengelola pendidikan. Penyebab terjadinya komersialisasi

pendidikan mencakup faktor- faktor politik, budaya, ekonomi, sosial, dan teknologi¹

Dalam hal ini penulis akan menggali mengenai pengertian Komersialisasi Pendidikan, dan Problem komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan atau mengomersialisasikan pendidikan kerap ditimpakan kepada kebijakan atau langkah-langkah yang menempatkan pendidikan sebagai sektor jasa yang diperdagangkan.

Dikemukakan oleh Milton Friedman dan Frederik Van Hayek (2008 : 115) bahwa “komersialisasi pendidikan merupakan keadaan pendidikan yang berpegang pada masyarakat industri dan selera pasar (market society)”. Selain itu, juga diungkapkan oleh Habibie (2005 : 257), bahwa “komersialisasi pendidikan telah mengantarkan pendidikan sebagai instrument untuk melahirkan buruh-buruh bagi sektor industri, bukan sebagai proses pencerdasan dan pendewasaan masyarakat”. Adanya komersialisasi pendidikan telah menggambarkan keadaan pendidikan saat ini bahwapendidikan lebih mengarah kepada praktik pendidikan layaknya lembaga penghasil mesin yang siap mem-supply pasar industri dan diukur secara ekonomis (Hartini, 2011 : 16).²

METODE

Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini didasarkan pada paradigma kualitatif, sehingga secara historis, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu tidak melibatkan analisis data kuantitatif. Dari segi objek penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian sejarah, yang melibatkan analisis dokumen secara terstruktur. Penelitian ini berfokus pada studi tentang pemikiran karakter, yang didasarkan pada karya tulis yang dihasilkan oleh karakter itu, seperti buku dan sumber informasi lainnya. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, sehingga teknik dokumentasi menjadi pendekatan yang relevan. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sumber informasi lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan teknik analisis isi. Analisis isi adalah metode penelitian yang digunakan untuk memeriksa secara mendalam isi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Komersialisasi Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komersialisasi diartikan: Perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Merujuk pada arti itu, komersialisasi pendidikan dapat diartikan: Menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan. Komersialisasi pendidikan atau mengomersialisasikan pendidikan kerap ditimpakan kepada kebijakan atau langkah-langkah yang menempatkan pendidikan sebagai sektor jasa yang diperdagangkan. Dikemukakan oleh Milton Friedman dan Frederik Van Hayek (2008 : 115) bahwa “komersialisasi pendidikan merupakan keadaan pendidikan yang berpegang pada masyarakat industri dan selera pasar (market society)”. Selain itu, juga diungkapkan oleh Habibie (2005 : 257), bahwa “komersialisasi pendidikan telah mengantarkan pendidikan sebagai instrument untuk melahirkan buruh-buruh bagi sektor industri, bukan sebagai proses pencerdasan dan pendewasaan masyarakat”. Adanya komersialisasi pendidikan telah menggambarkan keadaan pendidikan saat ini bahwapendidikan lebih mengarah kepada praktik pendidikan layaknya lembaga penghasil mesin yang siap mem-supply pasar industri dan diukur secara ekonomis (Hartini, 2011 : 16).³

Sedangkan menurut pendapat Giroux (2008 : 115), “adanya komersialisasi pendidikan telah mengubah institusi pendidikan yang berbasis efisiensi ekonomis menjadi perusahaan penyedia elite masyarakat dan kuli kerja”. Akibat komersialisasi pendidikan inilah, banyak lembaga pendidikan yang kemudian menganut paradigma pendidikan yang bersifat ekonomis. Banyak lembaga pendidikan yang akhirnya gagal mengimplikasikan bahwa proses pembelajaran menjadi salah satu pilar utama dalam humanisasi hidup manusia (Hartini, 2011 : 16).

Komersialisasi pendidikan secara tidak langsung juga telah menciptakan jurang pemisah antara pihak yang mempunyai modal dan pihak yang mempunyai sedikit modal. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ivan Illich dalam Benny Susanto (2005 : 119), “komersialisasi pendidikan dianggap sebagai misi lembaga pendidikan modern mengabdikan kepada kepentingan pemilik modal dan bukan sebagai sarana pembebasan bagi

¹ Zainuddin, Zainuddin, and M. Rozali. "KOMERSIALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA." *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman* 10.2 (2022). Hlm. 225.

² Hartini, D. (2011). *Komersialisasi Pendidikan Di Era Globalisasi* (Studi Kasus tentang Persepsi Masyarakat terhadap Kuasa Modal dalam Dunia Pendidikan di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta tahun 2011)

³ Hartini, D. (2011). *Komersialisasi Pendidikan Di Era Globalisasi* (Studi Kasus tentang Persepsi Masyarakat terhadap Kuasa Modal dalam Dunia Pendidikan di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta tahun 2011)

kaumtertindas”. Akibatnya pendidikan yang humanisasi tidak tercapai dalam proses pendidikan karena adanya komersialisasi pendidikan menurut Satriyo Brojonegoro hanya mampu dinikmati oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki modal untuk mengakses pendidikan (Hartini, 2011 : 16).

Adapun istilah “komersialisasi pendidikan” menurut Agus Wibowo (Hartini, 2011: 17) mengacu pada dua pengertian yang berbeda, yaitu :

- 1) Komersialisasi pendidikan yang mengacu lembaga pendidikan dengan program serta perlengkapan mahal.⁴ Pada pengertian ini, pendidikan hanya dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat ekonomi kuat, sehingga lembaga seperti ini tidak dapat disebut dengan istilah komersialisasi karena mereka memang tidak memperdagangkan pendidikan. Komersialisasi pendidikan jenis ini tidak akan mengancam idealisme pendidikan nasional atau idealisme Pancasila, akan tetapi perludicermati juga, karena dapat menimbulkan pendiskriminasian dalam pendidikan nasional.
- 2) Komersialisasi pendidikan yang mengacu kepada lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang gedung saja, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan. Komersialisasi pendidikan ini biasanya dilakukan oleh lembaga atau sekolah-sekolah yang menjanjikan pelayanan pendidikan tetapi tidak sepadan dengan uang yang mereka pungut dan lebih mementingkan laba. Itu hal yang lebih berbahaya lagi, komersialisasi jenis kedua ini dapat pula melaksanakan praktik pendidikan untuk maksud memburu gelar akademik tanpa melalui proses serta mutu yang telah ditentukan sehingga dapat membunuh idealisme pendidikan Pancasila. Komersialisasi ini pun telah berdampak pada tingginya biaya pendidikan. Secara gamblang, masyarakat “disuguhi sesuatu” yang (seolah-olah) mengamini kondisi tersebut. Contoh sederhana dapat dilihat ketika memasuki tahun ajaran baru.

Tak terbayangkan betapa banyaknya orang tua yang mengeluh akibat buku pelajaran yang digunakan tahun ajaran sebelumnya tidak lagi dapat digunakan di tahun ajaran berikutnya. Kondisi ini tentu sangat memberatkan masyarakat yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Siswa dipaksa menggunakan buku pelajaran baru sebagai pengganti buku lama yang konon “tidak layak” dipakai acuan lagi, dengan harga yang relatif tinggi. Padahal jika dicermati, materi atau pokok bahasan di dalamnya sama persis, tanpa ada “ilmu” baru yang dicantumkan.

Dengan demikian, dari pengertian komersialisasi pendidikan menurut para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komersialisasi pendidikan merupakan suatu keadaan atau situasi di dunia pendidikan yang lebih mengutamakan paradigma pendidikan dalam hal ekonomis (keuntungan) sehingga pengukuran keberhasilan pendidikan dalam proses humanisasi tidak tercapai. Akibatnya individu yang berasal dari kelas sosial rendah tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas seperti individu yang berasal dari kelas sosial atas.

b) Penyebab Terjadinya Komersialisasi Pendidikan

Berikut beberapa alasan penyebab terjadinya komersialisasi pendidikan yaitu:

- a. Swastanisasi pendidikan sebagai bagian dari liberalisme yang semakin mengglobal dan menyentuh berbagai bidang pendidikan. Menurut Ritzer (2005: 564-565), privatisasi pendidikan adalah konsekuensi logis dari “McDonalsasi Masyarakat” (McDonaldization Of Society) yang menjunjung prinsip kuantifikasi, efisiensi, terprediksi dan teknologisasi dalam setiap sendi kehidupan. Seperti halnya barang-barang konsumsi, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai public good, tetapi private good yang tidak lagi harus disediakan oleh pemerintah secara massal untuk menjamin harga murah.
- b. Pemerintah kurang atau tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai sektor pendidikan. Sebagai contoh mengalami kesulitan dana akibat krisis ekonomi. Keadaan tersebut dapat menjadi sebuah kebenaran, tetapi dapat juga menjadi sebuah kebohongan. Artinya, pemerintah bukan dikatakan tidak mampu, tetapi tidak memiliki visi untuk berinvestasi di bidang pendidikan.
- c. Pemerintah tidak mampu mengelola pendidikan sebagai sektor publik dengan baik. Sehingga lembaga pendidikan menjadi tidak efisien (mahal dan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan), tidak kompetitif (tidak termotivasi untuk bersaing meningkatkan mutu) dan tidak berkembang sebab swastanisasi merupakan cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- d. Lembaga pendidikan kurang memiliki kreativitas dan inovasi dalam melakukan “fund raising”, sehingga hanya mengandalkan siswa dan orangtua sebagai target utama perolehan dana.

c) Komersialisasi Pendidikan Islam

- a. Dampak dan pengaruhnya

⁴ Rustiawan, H. (2015). *KOMERSIALISASI PENDIDIKAN: Analisis Pembiayaan Pendidikan. Tazkiya*, 16(01), 44-63.

Di era Reformasi, kebijakan ekonomi pemerintah cenderung ditekan oleh kekuatan global. Mengutip gagasan Albow bahwa, "Globalization refers to all those processes by which the peoples of the world are incorporated into a single world society, global society."⁵ Globalisasi adalah istilah yang mengacu pada segala proses di mana individu di seluruh dunia menjadibagian dari satu komunitas global. Ketika berbicara tentang hubungannya dengan pendidikan Islam, globalisasi dapat diinterpretasikan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif globalisasi memiliki potensi untuk "membebaskan" lembaga pendidikan dari berbagai macam keterikatan, seperti sentralisme, uniformisme, monolitisme, desentralisasi, peningkatan demokratisasi dan equality dalam pendidikan, akselerasi ilmu pengetahuan, dan penyederhanaan kurikulum, di mana hanya subjek-subjek yang urgen dan instrumental bagi peserta didik dalam realitas global saja yang digunakan.⁶ Asumsinya, jika diserahkan kepada swasta akan terjadi kompetisi yang sehat, efisien, dan terjadi perbaikan kualitas layanan.⁷ Dampak negatif dari fenomena globalisasi adalah orientasi kapitalistik dalam pendidikan, yang mengakibatkan privatisasi atau pengelolaan swasta, sehingga lembaga pendidikan yang dibangun dengan menggunakan dana publik hanya dapat diakses oleh segelintir kelompok masyarakat yang mampu. Sementara masyarakat kurang mampu hanya dapat mengakses pendidikan di sekolah murah dengan standar yang rendah. Akibatnya, terjadi gap antara orang kaya dan miskin. Orang kaya mampu bersekolah di tempat berkualitas, unggulan, dan bagus, sedangkan orang miskin sebaliknya. Hal ini ditunjang dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 bahwa jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) sebesar 25,95 juta orang (9,82 persen).

Pada kondisi ini, terjadi minimalisasi peran negara dan maksimalisasi peran swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dinamakan kebijakan neo-liberalisme. Sektor pendidikan termasuk bagian yang terdampak kebijakan ini. Liberalisasi di bidang pendidikan ditandai dengan diberikannya hak kepada institusi-institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat (siswa dan mahasiswa). Akibatnya, biaya pendidikan menjadi menggelembung dan ada kecenderungan terjadi komersialisasi⁸ pendidikan diberbagai tingkatan, sehingga banyak warga masyarakat tidak mampu membayar.⁹

Terdapat dua konsep dalam komersialisasi pendidikan. Pertama, komersialisasi pendidikan yang menekankan pada program dan peralatan pendidikan yang mahal. Kedua, komersialisasi pendidikan yang hanya memprioritaskan biaya pendaftaran dan biaya gedung, tanpa memerhatikan tanggung jawab pendidikan yang seharusnya dilakukan.¹⁰ Pemahaman pertama akan mengakibatkan diskriminasi dalam pendidikan, sedangkan pengertian yang kedua, lembaga pendidikan menjanjikan pelayanan namun di bawah standar keuangan yang dibayarkan dengan pengambilan laba. Namun dalam hal ini, pengertian komersialisasi yang pertama yang digunakan.

Adapun indikator dari komersialisasi pendidikan, yaitu (1) penyelenggaraan pendidikan dijadikan komoditas yang diperjual-belikan, (2) penyelenggaraan pendidikan memerlukan biaya yang mahal, (3) penyelenggaraan pendidikan tidak memberikan kesempatan pada peserta didik dari kalangan masyarakat kurang mampu, (4) penyelenggaraan pendidikan tidak memberikan subsidi silang atau dispensasi uang sekolah bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi, dan (5) penyelenggaraan pendidikan lebih berorientasi mencari keuntungan. Indikator-indikator tersebut memunculkan pemikiran bahwa pendidikan memang menjadi tempat yang rentan bagi terjadinya praktik-praktik komersial.¹¹ Komersialisasi sendiri merujuk pada ideologi kapitalisme.¹²

b. Solusi dari Komersialisasi Pendidikan Islam

⁵ Martin Albrow, *Globalization, Knowledge and Society* (London: SAGE Publications, Inc., 1990), 45.

⁶ Emawati, "Dampak Kapitalisme Global Terhadap Pendidikan Islam," *Jurnal Penelitian Keislaman* 14, no. 02 (2018): 145–46.

⁷ Agus Suwignyo, *Negara Minus Nurani: Esai-Esai Kritis Kebijakan Publik* (Jakarta: Kompas, 2009), 59.

⁸ Istilah komersialisasi berasal dari kata komersil yang bermakna: 1) berhubungan dengan niaga atau perdagangan, 2) dimaksud untuk diperdagangkan atau sesuatu yang diperjual-belikan atau sesuatu yang bernilai tinggi yang mengorbankan nilai-nilai lain (nilai sosial, budaya, dan sebagainya). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 515.

⁹ Kebudayaan, 60.

¹⁰ Muchtari Buchtari, *Komersialisasi Idealisme Bukan Tabu* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 201.

¹¹ Herlina Asri, "Dampak Komersialisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia," *Jurnal Kajian*, 16, no. 3 (2011): 607–8.

¹² Kapitalisme secara etimologi berasal dari kata "capital" (bahasa Latin). *Capital* sebenarnya diambil dari kata "caput" yang berarti kepala. Arti ini menjadi jelas jika digunakan dalam istilah "pendapatan perkapita" yang berarti "pendapatan perkepala." Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2005), 52.

Sejatinya, Islam tidak mengenal konsep komersialisasi dalam pendidikan. Sebab, orientasi pendidikan sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan sunah adalah untuk ibadah. Namun, pendidikan Islam juga terlepas tangan dengan pembiayaan. Oleh karenanya, diperlukan alternatif atau Solusi bagi lembaga pendidikan Islam untuk mendapatkan pembiayaan dan tidak bergantung pada iuran dari peserta didik.

1. Reorientasi Pendidikan Islam

Tradisi keilmuan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peradaban manusia. Tradisi keilmuan merupakan fondasi dari pembentukan ilmu di dalam suatu peradaban (masyarakat),¹³ karena intidari peradaban Islam adalah bahwa ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang dihidupkan oleh tradisi intelektual.¹⁴ Dalam pembentukan peradaban tersebut, pada hakikatnya pendidikan disampaikan untuk semua (*education for all*) tanpa diskriminasi terhadap siapa pun.¹⁵ Sebab, tujuan pendidikan Islam adalah "to produce a goodman", yakni menghasilkan manusia yang baik dengan pengajaran adab.¹⁶ Dalam tradisi keilmuan Islam, tujuan akhir dari pendidikan harus membentuk manusia yang memiliki adab, sehingga Islam menjadisebuah peradaban. Dalam konsep pendidikan Islam dikenal beberapa istilah, di antaranya tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Istilah tarbiyah memiliki makna sebagai proses mendidik, memelihara, menjaga, dan membinasemua makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.¹⁷ Istilah ini bersifat umum karena digunakan untuk semua entitas yang mengalami pertumbuhan dan pembelajaran, seperti proses tarbiyah pada hewan. Namun, menurut al-Attas, istilah tarbiyah tidak sepenuhnya tepat jika digunakan untuk merujuk pada pendidikan dalam konteks Islam.¹⁸ Sedangkan konsep ta'lim,¹⁹ biasanya merujuk pada pembelajaran yang bermakna transfer ilmu pengetahuan²⁰ dan teknologi yang dikaitkan dengan nilai-nilai Ilahiah. Proses pembelajaran ini dilaksanakan lebih mengedepankan aspek wacana keilmuan melalui pengembangan intelektualitas kepada peserta didik secara berkelanjutan.²¹ Adapun ta'dib, berasal dari kata "addaba"²² dan derivasinya. Ia mengandung arti bahwa pendidikan dalam Islam mencakup ilmu dan amal.²³ Pendidikan Islam merupakan hasil dari konsepsi beberapa unsur, konsep agama (dīn), konsep manusia (insān), konsep ilmu ('ilm dan ma'rifah), konsep kebijakan (fiikmah), konsep keadilan ('adl), konsep amal (amal sebagai adab), dan konsep universitas (kuliyyah-jāmi'ah).²⁴ Oleh karenanya, istilah ta'dib lebih integratif dan komprehensif karena sudah mencakup pengetahuan ('ilm), pengajaran (ta'lim), dan pengasuhan yang baik (tarbiyah).²⁵ Pendidikan dengan ta'dib itu mengarahkan manusia untuk mengenal Tuhannya, menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan, dan mengikuti jalan para ulama. Dari sini, manusia beradab memahami serta mampu mengembangkan potensi dirinya, sebab potensi tersebut adalah amanah dari Allah.²⁶ Pendidikan dengan ta'dib itu juga bertujuan menghasilkan individu Muslim yang terdidik dengan baik, memiliki sifat yang benar, jujur, moderat, berani, dan adil dalam menjalankan kewajibannya dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan prioritas yang dipahaminya.²⁷ Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

¹³ Alparslan Açıkgöç, *Lahirnya Tradisi Keilmuan Dalam Islam* (Jakarta: INSISTS, 2019), 3.

¹⁴ Hamid Fahmy Zarkasyi, "Bayt-UI-Hikmah Akademi Pertama Dalam Islam", *Jurnal Islamia* (Jakarta: Khairul Bayat Press, 2009), 90.

¹⁵ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenata Media Grup, 2010), 105.

¹⁶ Syed Muhammad Al-Naqib Al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), 150–51.

¹⁷ Jalaluddin, *Teologi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 115.

¹⁸ Syed Muhammad Al-Naqib Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, ed. Haidar Baghir (Jakarta: Mizan, 1992), 35

¹⁹ Istilah *ta'lim* dalam Al-Qur'an menggunakan bentuk *fi'il* (kata kerja) dan *isim* (kata benda) dengan penyebutan 41 kali pada 23 surah. Salah satunya terdapat dalam QS. al-Rahman (55) ayat 1-4 yang mengandung arti memberi tahu, menjelaskan, dan memberi pemahaman. Ahmad Takdir Ilahi, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral* (Yogyakarta: Ar-RuzMedia, 2012), 161.

²⁰ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islami* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 145.

²¹ Ilahi, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*, 162–63.

²² Syed Muhammad Al-Naqib Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, ed. Haidar Baghir (Jakarta: Mizan, 1992), 53. Lihat juga Wan Mohn Nor Wan Daud, *Filsa*

²³ Daud, 77.

²⁴ Syed Muhammad Al-Naqib Al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, 8.

²⁵ Daud, 75

²⁶ Adian Husaini, *Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter Dan Beradab* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2010), vii.

²⁷ Daud, *Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquin Al Attas*, 201.

tauhid, di mana objek-objek pendidikan dilihat melalui pandangan hidup Islam (Islamic worldview).²⁸ Dalam konteks sebagai pendidik, penting bagi seseorang untuk memegang nilai-nilai Islam. Menurut Imam al-Ghazali, seorang guruharus memiliki etika khusus dan tugas-tugas tertentu. Pertama, guru harus menunjukkan kasih-sayang kepada murid dan memperlakukannya dengan penuh perhatian seolah-olah mereka adalah anak sendiri. Kedua, guru harus mencontoh perilaku Rasulullah saw. Dalam hal ini, motivasi mengajar bukanlah mencari upah, penghargaan, atau ucapan terima kasih, tetapi semata-mata untuk Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ketiga, guru tidak boleh mengabaikan sedikit pun nasihat dengan melarang murid untuk mempelajari tingkat tertentu sebelum mereka berhak melakukannya. Mereka juga harus belajar ilmu yang lebih dalam sebelum menyelesaikan ilmu yang lebih dasar. Tujuan dari menuntut ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah.²⁹ Jadi, meski pendidik diperkenankan mendapat upah, namun etika dalam Islam, pendidik harus meluruskan niat bahwa dia mengajar niatnya untuk beribadah kepada Allah.

2. Kemandirian Lembaga Pendidikan Islam

Pendanaan dalam konteks pendidikan memiliki peranan penting dalam pendidikan Islam. Meskipun pendanaan bukanlah segalanya, namun tanpa pendanaan, pelaksanaan pendidikan akan sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁰ Terdapat beberapa prinsip yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan dana pendidikan dalam Islam, di antaranya ikhlas, tanggung jawab terhadap Tuhan, sukarela, halal, kecukupan, berkelanjutan, keseimbangan, dan proporsional.³¹ Untuk menuju kemandirian dalam pembiayaan, selain dari pemberian pemerintah dan iuran orang tua murid, juga dapat digali dari pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf.³²

Hasil penelitian yang dilakukan oleh CSRC UIN Jakarta menunjukkan bahwa dari jumlah derma yang terkumpul setiap tahun sebesar 19,3 triliun Rupiah, hanya 5%-7% yang mampu diserap oleh lembaga pegumpul zakat, infak, dan sedekah yang terlembaga secara profesional, sedang selebihnya diserahkan langsung oleh pemberi kepadafakir-miskin atau lembaga penyalur yang berbasis masjid. Distribusi dana filantropi Islam tersebut secara umum berorientasi konsumtif, sehingga belum berfungsi secara maksimal. Meskipun demikian, pertumbuhan lembaga profesional pengelola ZIS (zakat, infak, dan sedekah) yang disponsori oleh pemerintah (Badan Amil Zakat/BAZ), maupun yang dikelola oleh masyarakat (Lembaga Amil Zakat/LAZ dan Baitul Mal wat Tamwil/BMT) telah berusaha memadukan konsep derma dalam Islam dengan konsep manajemen pemberdayaan dan rekayasasosial guna membangun paradigma filantropi Islam yang berorientasi produktif.³³ Salah satu contoh penerapan dana umat dalam pemberdayaan pendidikan yang dikembangkan Dompert Dhuafa adalah sekolah SMART Ekselensia Indonesia.³³ Sekolah ini adalah sebuah institusi pendidikan berasrama yang menawarkan program akselerasi selama 5 tahun dari tingkat SMP hingga SMA, dan biaya sekolahnya gratis. Didirikan pada tahun 2004 di Parung, Bogor, sekolah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang memiliki potensi namun menghadapi kendala ekonomi yang cukup besar.³⁴

Salah satu contoh penggunaan wakaf produktif yang memiliki dampak signifikan dalam pengembangan pendidikan, adalah seperti yang telah dilakukan di Al-Azhar Mesir. Dalam pengelolaan dana hasil wakaf produktif di Al-Azhar, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) menggunakan dana tersebut untuk mendukung biaya operasional pendidikan di Al-Azhar, (2) memberikan keberlangsungan kesejahteraan bagi guru, dosen, dan staf pendidikan, (3) membiayai pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan, (4) membangun fasilitas penunjang, seperti gedung olahraga, lapangan sepak bola, dan fasilitas lainnya, (5) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan (6) melakukan pembangunan masjid sebagai bagian dari pengembangan pendidikan di Al-Azhar.³⁵ Di Indonesia, contoh lembaga yang berhasil melakukan pengelolaan wakaf produktif

²⁸ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Prolegomena to the Metaphysics of Islam, An Exposition of The Fundamental Element of The Worldview of Islam* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), 2.

²⁹ Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Semarang: Toha Putra, n.d.), 55–46.

³⁰ Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, 219.

³¹ Nata, 229–30.

³² Penulis merujuk istilah ini kepada Farid Wadjdy and Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 125. Lihat juga Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq Dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), vi

³³ Ahmad Gaus A. F., *Filantropi Dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), viii.

³⁴ Prima Hadi Putra, "Program Pendidikan," Yayasan Dompert Dhuafa Republika, accessed November 19, 2019, <https://www.dompertdhuafa.org/program/program-pendidikan/>.

³⁵ Abdurrahman Kasdi, "Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Quality* 3, no. 2 (2015): 443–45.

adalah Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo di Jawa Timur. Institusi pendidikan ini tidak bergantung pada pihak lain termasuk subsidi dari pemerintah, namun berusaha untuk melakukan kegiatan ekonomi mandiri dengan mengelola harta bendawakaf secara produktif dengan unit-unit usaha di atas tanah wakaf,³⁶ dengan bidang usaha berupa perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, pabrik, percetakan, dan penerbitan.³⁷ Unit-unit usaha yang dikelola sangat banyak berupa, apotek, toko bangunan, konveksi, SPBU, pabrik roti dan lain sebagainya, yang kesemua hasil dari unit usaha tersebut digunakan untuk kesejahteraan guru, pembantu pondok, sarana prasarana dan pengembangan institusi pendidikan. Biaya penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak dibebankan kepada santri (dalam hal ini sebagai peserta didik). Santri hanya dikenakan biaya-biaya yang berkenaan dengan kebutuhannya sendiri, seperti makan, minum, kertas, listrik, dan sumbangan pembangunan. Besarnya biaya yang dibayarkan santri tidak sebanding dengan besarnya anggaran belanja pondok.³⁸

KESIMPULAN

Komersialisasi pendidikan merupakan suatu keadaan atau situasi di dunia pendidikan yang lebih mengutamakan paradigma pendidikan dalam hal ekonomis (keuntungan) sehingga pengukuran keberhasilan pendidikan dalam proses humanisasi tidak tercapai. Akibatnya individu yang berasal dari kelas sosial rendah tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas seperti individu yang berasal dari kelas sosial atas.

Beberapa alasan penyebab terjadinya komersialisasi pendidikan yaitu : 1). Swastanisasi pendidikan sebagai bagian dari liberalisme yang semakin mengglobal dan menyentuh berbagai bidang pendidikan 2). Pemerintah kurang atau tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai sektor pendidikan 3). Pemerintah tidak mampu mengelola pendidikan sebagai sektor publik dengan baik 4). Lembaga pendidikan kurang memiliki kreativitas dan inovasi dalam melakukan “*fund raising*”.

Terdapat dua konsep dalam komersialisasi pendidikan. Pertama, komersialisasi pendidikan yang menekankan pada program dan peralatan pendidikan yang mahal. Kedua, komersialisasi pendidikan yang hanya memprioritaskan biaya pendaftaran dan biaya gedung, tanpa memerhatikan tanggung jawab pendidikan yang seharusnya dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami Panjatkan Syukur atas perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT yang senantiasa memberikan segala kenikmatan. Terima kasih Kepada Prof. Sugeng dan Bapak Dr. Hufron selaku dosen pengampu mata kuliah kami, yang tidak Lelah dalam membimbing kami, sehingga kami dapat mencapai di titik ini, serta teman-teman Magister Pendidikan Agama Islam UIN KH Abdurrahman Wahid khususnya Angkatan saya, yang senantiasa mendengarkan segala keluh kesah suka duka dalam menempuh Program S2 yang sedang ditempuh ini,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Kasdi, 2015. “Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Quality* 3, no. 2
- Abuddin Nata, 2010. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenata Media Grup,
- Syed Muhammad Al-Naqib Al-Attas, 1993. *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC.,
- Adian Husaini, 2010. *Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter Dan Beradab* (Jakarta: Cakrawala Publishing
- Agus Suwignyo, 2009. *Negara Minus Nurani: Esai-Esai Kritis Kebijakan Publik* (Jakarta: Kompas
- Ahmad Gaus A. F., Ahmad Gaus A. F., *Filantropi Dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Filantropi Dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008
- Alparslan Açıkgöç, 2019. *Lahirnya Tradisi Keilmuan Dalam Islam* (Jakarta: INSISTS,

³⁶ Anas Budiharjo, *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo* (Yogyakarta: UIN Sunankalijaga, 2011), 65.

³⁷ Nurul Iman, *Wakaf untuk Kemandirian Pendidikan: Best Practice Manajemen Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo* (Ponorogo: Penerbit Wade, n.d.), 215

³⁸ Iman, *Wakaf Untuk Kemandirian Pendidikan: Best Practice Manajemen Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*, 215–16

- Hamid Fahmy Zarkasyi, 2009. "Bayt-UI-Hikmah Akademi Pertama Dalam Islam", *Jurnal Islamia* (Jakarta:Khairul Bayat Press,
- Al Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Semarang: Toha Putra, n.d.)
Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman 10.2
- Anas Budiharjo, 2011 *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogon* Yogyakarta: UIN Sunankalijaga
- Baghir, 2012. (Jakarta:Mizan, Istilah *ta'lim* dalam Al-Qur'an menggunakan bentuk *fi'il* (kata kerja) dan *isim* (kata benda) dengan penyebutan 41 kali pada 23 surah. Salah satunya terdapat dalam QS. al- Rahman (55) ayat 1-4 yang mengandung arti memberi tahu, menjelaskan, dan memberi pemahaman. Ahmad Takdir Ilahi, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral* Yogyakarta: Ar-RuzMedia
- Baghir 2012. (Jakarta:Mizan, Lihat juga Wan Mohn Nor Wan Daud, *Filsa Daud, Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquin Al Attas*.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1995. *Prolegomena to the Metaphysics of Islam, An Exposition of The Fundamental Element of The Worldview of Islam* (Kuala Lumpur: ISTAC,
- Emawati, 2018. "Dampak Kapitalisme Global Terhadap Pendidikan Islam," *Jurnal Penelitian Keislaman* 14, no. 02
- Hartini, D. (2011). *Komersialisasi Pendidikan Di Era Globalisasi* (Studi Kasus tentang Persepsi Masyarakat terhadap Kuasa Modal dalam Dunia Pendidikan di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta
- Herlina Asri, 2011. "Dampak Komerisalisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia," *Jurnal Kajian*, 16, no. 3
- Iman, *Wakaf Untuk Kemandirian Pendidikan: Best Practice Manajemen Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*,
- Jalaluddin, 2003 *Teologi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Mahmud Yunus, 1979. *Sejarah Pendidikan Islami* (Jakarta: Bulan Bintang,
- Ilahi, *Revitalisasi Pendiidkan Berbasis Moral*
- Martin Albrow, *Globalization*, 1990. *Knowledge and Society* (London: SAGE Publications, Inc.,
- Muchtari Buchtari, 2001. *Komersialisasi Idealisme Bukan Tabu*. Yogyakarta: Kanisius,
- .2005. Kapitalisme secara etimologi berasal dari kata "*capital*" (bahasa Latin). *Capital* sebenarnya diambil dari kata "*caput*" yang berarti kepala. Arti ini menjadi jelas jika digunakan dalam istilah "pendapatan perkapita" yang berarti "pendapatan perkepala."
- Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
- Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, 1992. *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, ed. Haidar
- Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*
- Nurul Iman, *Wakaf untuk Kemandirian Pendidikan: Best Practice Manajemen Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo* (Ponorogo: Penerbit Wade, n.d.)
- Penulis merujuk istilah ini kepada Farid Wadjdy and Mursyid, 2007. *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,), 125. Lihat juga Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq Dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011
- Prima Hadi Putra, 2019. "Program Pendidikan," Yayasan Dompot Dhuafa Republika, accessed November 19, , <https://www.dompotdhuafa.org/program/program- pendidikan/>.
- Rustiawan, H. 2015. *KOMERSIALISASI PENDIDIKAN: Analisis Pembiayaan Pendidikan*. *Tazkiya*
- Zainuddin, Zainuddin, and M. Rozali. 2022. "Komersialisasi Pendidikan Di Indonesia".